

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris merupakan suatu bentuk kerjasama dalam bidang keamanan siber dengan tujuan untuk saling memperkuat ketahanan siber di masing-masing negara. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris menandatangani nota kesepahaman kerjasama dalam bidang keamanan siber pada 14 Agustus 2018 di Jakarta. Terdapat 5 poin yang disepakati secara bersama, namun dalam pelaksanaan dari ke-5 poin kerjasama tersebut, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris lebih terfokus kepada Peningkatan Kapasitas. *Cyber dialog forum* yang merupakan bentuk dari penerapan kerjasama ini, pada poin Peningkatan Kapasitas, kedua negara membahas *cyber law* dan *cybersecurity* dalam *cyber dialog forum*.

Inti dari pembahasan terkait Peningkatan Kapasitas adalah bagaimana kedua peserta berusaha untuk meningkatkan dan memajukan perilaku negara untuk bertanggungjawab di dunia siber dalam rangka menjaga keamanan internasional, saling berbagi informasi dalam membantu dan mengembangkan pemahaman organisasi ataupun suatu instansi terkait keamanan siber pada saat melakukan pengelolaan data, sistem, aset termasuk sumber daya manusia. Adanya sumber daya yang mendukung dan mumpuni, sehingga akan mampu untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memberikan perlindungan dan pertahanan, serta mampu menanggapi

atau menentukan sikap dalam mengambil tindakan saat sebelum dan terjadi serangan pada dunia maya serta mampu dalam mendukung pemulihan serangan siber sehingga mampu meminimalisir dampak yang diakibatkan dari serangan siber yang dilakukan. Pada Kapasitas Pengembangan ini juga membantu kedua peserta dalam membuat kerangka kerja keamanan siber, sehingga akan lebih mempermudah organisasi ataupun instansi pemerintah dalam mengambil keputusan ataupun menentukan manajemen risiko keamanan siber.

Dalam kerjasama tersebut dapat dikatakan bahwa baik Indonesia dan Inggris sama-sama memiliki kepentingan nasional yang ingin dipenuhi melalui kerjasama dalam bidang keamanan siber. Melalui kerjasama ini, Pemerintah Indonesia dapat mengatur ulang kembali strategi keamanan siber serta dapat memberdayakan secara efektif sektor-sektor pemerintahan, akademisi serta industri dalam menjalankan strategi keamanan siber nasional Indonesia. Sementara Pemerintah Kerajaan Inggris memiliki kepentingan yaitu mewujudkan salah satu *National Strategy 2016-2021* yakni bersedia bekerjasama secara internasional untuk menjadi negara yang aman di dunia maya untuk melakukan bisnis, melalui kerjasama internasional hal ini bertujuan untuk mempromosikan Inggris sebagai negara yang aman untuk melakukan bisnis ataupun berinvestasi secara digital. Pada intinya, kedua negara memiliki tujuan bersama yakni untuk semakin meningkatkan keamanan siber nasional di masing-masing negara.

Pelaksanaan terhadap kerjasama dalam bidang keamanan siber mengalami kendala yang harus dihadapi oleh kedua negara yakni penyesuaian waktu pimpinan

dalam melaksanakan *cyber dialog forum*, pertukaran informasi oleh kedua negara terkait siber harus dilaksanakan pada forum resmi dan tidak pada forum informal, kendala lainnya adalah *cyber dialog forum* harus dilaksanakan pada *high level* sebelum dilaksanakan pada *low level*.

Walaupun terdapat berbagai kendala dalam melaksanakan kerjasama keamanan siber, serta dampak yang dirasakan dari hasil kerjasama ini belum dapat dirasakan secara signifikan dan berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan bentuk pelaksanaan yang dilaksanakan masih dalam bentuk pembahasan, dan belum ada tindakan secara nyata seperti pelaksanaan pelatihan bagi sumber daya manusia untuk kedua negara dalam mengelola teknologi ataupun pelatihan dalam teknik mengatasi ancaman siber seperti penyerangan yang dilakukan melalui virus.

## **5.2. Saran**

Sebagai masyarakat internasional kita harus dapat memahami terkait perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga kita dituntut untuk semakin sadar serta melindungi keamanan data seperti menjaga kerahasiaan data, melindungi akurasi serta kelengkapan data dan informasi dari dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terutama penggunaan fasilitas dan infrastruktur dari internet.

Kondisi keamanan siber yang lemah bagi suatu negara akan sangat berpengaruh kepada negara lain yang dikarenakan sifat internet yang tidak memandang batas negara, sehingga perlu adanya kerjasama baik secara bilateral

maupun multilateral atau antar lembaga keamanan informasi antar negara sehingga dapat memperkuat keamanan informasi dan mampu mengimbangi hal-hal yang sama dengan negara lain dalam konteks keamanan siber.

Untuk meminimalisir penyalahgunaan tindakan dalam menjaga keamanan informasi, maka perlu dilakukan tindakan dalam pengamanan personal. Maksudnya adalah perlu adanya tanggungjawab dari karyawan ataupun para pemangku kepentingan yang menjalankan suatu perusahaan, organisasi ataupun instansi pemerintah terutama pada bagian pemrosesan informasi data yang dapat dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian kerahasiaan informasi data.

Selain itu, perlu dilakukannya sosialisasi atau promosi kesadaran keamanan informasi yang dapat dilakukan secara berkala sehingga para pengguna ataupun pemangku kepentingan semakin sadar akan pentingnya keamanan informasi dan data.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa kerjasama ini belum secara efektif dilaksanakan oleh kedua negara. Belum adanya penerapan secara langsung yang dapat dirasakan oleh multistakeholder pada bidang keamanan siber, sehingga semoga kedepannya kerjasama ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama, sehingga dampak dari kerjasama ini dapat dirasakan oleh seluruh elemen.

Pemerintah Indonesia juga dapat menggerakkan sektor pendidikan untuk melakukan kerjasama atau bertukar informasi dengan universitas di Inggris yang memiliki kapasitas dan kualifikasi dalam bidang keamanan siber sehingga dapat dikembangkan di Indonesia terkhusus di bidang pendidikan.